



---

## **PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI BANGSA**

**Miftahul Ikrom, Beti Zania, Siti Tiara Maulia**  
Universitas Jambi  
miftahulikrom5@gmail.com

### **Abstract**

*After the United States, Indonesia is the fourth most populous nation, with more than 267 million people according to the 2019 SUPAS, and a diverse population in terms of socioeconomic, religious, racial, and ethnic groups. It's been constructed. The diversity of Indonesian society is influenced by a number of variables both within and outside the community. The integrity of the Indonesian country may be threatened by this challenge of diversity. By using a literature approach to gather literature pertinent to the research being done, we hope to analyze diversity within the context of Bhinneka Tunggal Ika. The findings of this research indicate various strategies for fostering cooperation between ethnic communities, religious communities, and other social groups while upholding the values of solidarity, equality, and reciprocal respect.*

### **Abstrak**

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipisahkan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri.

### **Article History**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 20 Maret 2023  
Published: 31 Maret 2023

### **Key Words**

*Diversity; National Integration; Bhineka Tunggal Ika.*

### **Sejarah Artikel**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 20 Maret 2023  
Published: 31 Maret 2023

### **Kata Kunci**

Pancasila, Dasar Negara, Ideologi, Bangsa

### **Pendahuluan**

Pancasila adalah jiwa kolektif seluruh rakyat Indonesia; ia memberikan kehidupan bagi negara dan mengarahkan masyarakat untuk membangun masyarakat yang adil dan sukses. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila adalah karakter bangsa dan pandangan hidup. Itu telah diakui dan ditetapkan sebagai dasar negara.

Memahami bahwa untuk melestarikan dan mempertahankan Pancasila, setiap warga negara Indonesia, setiap pemerintahan Indonesia, serta setiap lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan, harus berupaya sungguh-sungguh, terus menerus untuk memahami dan menghayati prinsip-prinsip luhur yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan Pancasila yang menggambarkan sejumlah urutan yang masing-masing sila memiliki kedudukan tertentu dalam kumpulan susunan yang padu.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar Negara yaitu Pancasila yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh,



tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat, perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Di era yang serba modern ini, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sedikit dilupakan oleh sebagian rakyat Indonesia dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Padahal sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa di tukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan kata lain, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat akar dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sudah mengakar dalam kepribadian bangsa, maka dapat diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Menurut Kaelan (2009: 46), Pancasila yaitu mempunyai peranan dan fungsi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila sebagai jati diri bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan masyarakat Pancasila perlu usaha dilakukan secara berencana dan terarah. Tujuannya agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan segenap warga negara yang diharapkan pembinaan masyarakat Indonesia agar menjadi insan Pancasila dan pembangunan bangsa untuk mewujudkan



---

masyarakat Pancasila. Pembinaan insan Pancasila dapat melalui jalur pendidikan maupun masyarakat atau sebuah organisasi masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Artinya siapa saja yang melanggar hukum harus ditindak menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sedangkan menurut Kansil (2005: 28), pengamalan Pancasila adalah

Pengalaman Pancasila sebagai *welltaunshuang* yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap masyarakat Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung didalamnya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dan arah hidup manusia Indonesia termasuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan ciri-ciri umum yang dapat berubah atau berkembang tergantung pada keadaan. Penelitian bersifat deskriptif karena hasil pengumpulan data diceritakan daripada angka. Penelitian ini dikenal dengan penelitian kepustakaan, baik dengan menggunakan pendekatan pustakawan maupun dengan mengumpulkan literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan beserta dokumen-dokumen yang relevan.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti



---

ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan

Dokumen tentang keragaman suku, agama, ras, dan golongan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. dan kemudian, sebagaimana mestinya, suku, agama, ras, Bhinneka Tunggal Ika, termasuk jurnal, laporan penelitian, jurnal akademik, surat kabar, buku yang relevan, hasil seminar, makalah akademik yang tidak dipublikasikan, sumber, keputusan, dll. Keanekaragaman antar kelompok dalam kerangka. Sumber data primer diperoleh dari literatur untuk penelitian ini

## **PEMBAHASAN**

Pancasila, nama dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung arti lima dasar atau lima asas. Buku Negara Kertagama karya Prapanca dan buku Sutasoma karya Tantular sama-sama mencantumkan nama Pancasila yang sudah ada sejak zaman Majapahit pada abad XIV. Dprakarsai pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila. Rumusan Pancasila yang diberikan dalam alinea pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Karena Pancasila merupakan kualitas yang eksklusif bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat dibedakan dengan bangsa Indonesia yang memiliki lima sila, maka Pancasila merupakan kepribadian negara Indonesia.



---

### **A. Pancasila Sebagai Falsafah Demokrasi Bangsa**

Pada 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengakui Pancasila sebagai ajaran negara Republik Indonesia. 1945. Istilah Sansekerta panca berarti lima, dan sila berarti norma-norma tingkah laku yang baik, tata krama, atau tingkah laku yang tidak baik, digabungkan menjadi pengertian Pancasila. Sila-sila Pancasila mencakup falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang bersifat universal, meliputi komponen duniawi dan ukharawi, mental spiritual, moralitas, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Alhasil, jika negara dan seluruh warganya mengakui Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, maka tidak akan mengalami kepunahan ideologis. Dalam demokrasi unsur partisipasi politik seluruh masyarakat sangat penting, karena kebijakan sosial turut andil dalam pembangunan negara Indonesia, dan kebijakan sosial membebaskan negara dari belenggu kolonialisme dan kolonialisme. Belanda dan Jepang. Sifat sosial-politik menyadarkan setiap anak di negeri ini dan meletakkan dasar bagi kehidupan Panchasilis melalui berbagai pandangan.

Partisipasi politik sukarela warga negara merupakan perwujudan dari keutamaan bangsa sebagai salah satu prinsip demokrasi substantif, bagian terpenting dari kehendak rakyat. Demokrasi adalah cara melakukan partisipasi politik umum sebagai ungkapan kemerdekaan dan kebebasan berkehendak, berpendapat dan bertindak melalui lubang keadilan sejati demi ketertiban dan kepemimpinan politik bangsa dan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan konstitusional.

Demokrasi era reformasi merupakan rumusan keterbelakangan dalam arti politik dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia dalam membangun bangsa dan bangsa. Formula yang dimaksud adalah partisipasi seluruh komunitas, yang menghubungkan suara hati nurani dengan realitas sosial aktual. Hadiah utama demokrasi di era reformasi ini adalah membangun masyarakat yang mandiri, dewasa, cerdas, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Ini adalah masyarakat sipil atau masyarakat pada cita-cita masyarakat sipil. Nurcholih Majid mempromosikan gagasan masyarakat sipil sebagai tempat perlindungan demokrasi itu sendiri. Karena dialah yang mewujudkan. Wujud aspirasi rakyat yang beraneka warna mencerminkan kepentingan negara-negara dalam



---

menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, menyerukan keahlian dalam permusyawaratan perwakilan.

### **B. Pancasila Sebagai Norma Hukum Dan Norma Etika, Dalam Penyelenggaraan Negara Wajib Menjunjung Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Kebijakan Dan Tindakan**

Sumber segala informasi hukum di negara kita adalah Pancasila. Pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan moral itulah yang melingkupi suasana kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia. Jadi Baik ketentuan hukum maupun penegakan atau implementasinya harus efektif dari nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa. Dengan tetap menjunjung tinggi kandungan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila, maka pelaksanaan penegakan hukum harus bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam realitas kehidupan di negara kita. Bagaimana aparat penegak hukum memancarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang digerakkan oleh hikmat dalam permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya menghadapi masalah. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan penegakan hukum yang dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaannya dapat memancarkan perwujudan nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penegakan hukum dilandasi oleh nilai-nilai etika, moral dan spiritual yang merupakan komitmen yang teguh. Untuk kedalaman kewajiban hukum kita. Oleh karena itu, penuntutan pidana tidak hanya bertujuan untuk menegakkan kebenaran formil, tetapi juga untuk menemukan kebenaran materiil, yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, tanggung jawab penegakan hukum juga didasarkan pada sikap, etika, moralitas, dan spiritualitas. Penegakan hukum didasarkan pada, dan pada saat yang sama, ditujukan untuk memperkuat martabat manusia. Hukum demikian memperlakukan manusia seutuhnya secara adil dan beradab dalam wujud individu dan sosialnya serta dalam kodratnya sebagai makhluk Tuhan.

Pada saat yang sama, lembaga penegak hukum diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Melalui aparat penegak hukum, terjamin persatuan dan kesatuan



---

bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dengan menjamin agar setiap warga negara yang berbeda latar belakang merasa terlindungi dan terlindungi hak dan kewajibannya. Didukung melalui bentuk penanganan. Penuntutan pidana juga bertujuan untuk melaksanakan hak-hak warga negara Ini mengatasi semua pengertian hak kelas yang berlaku sama untuk perlindungan warga negara Indonesia.

### C. Pancasila Sebagai Dasar Etika Dalam Berpolitik Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya pelaksanaan tugas tidak lepas dari norma-norma etika. , menyakiti dan bertindak dalam kehidupan orang-orang. Membangun moralitas politik yang cangguh agar kehidupan politik dapat tertata dengan baik, etika politik yang diterima masyarakat berdasarkan Pancasila, dan budaya politik yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat tercipta. Pola pikir yang harus dilakukan.

Berbicara tentang etika politik dalam kehidupan negara kita tampaknya agak subyektif. Cari kelemahan faksi. Oleh karena itu, terwujudnya etika politik yang baik dalam kehidupan suatu bangsa sangat tergantung pada kejujuran dan integritas seluruh warga negara yang telah memiliki hak politik untuk menegakkan norma dan aturan politik di negara tersebut.

Berbicara mengenai etika erat kaitannya dengan norma moral, norma untuk mengukur baik buruknya perilaku manusia, yaitu etika politik. Tanggung Jawab atas Tugas kepada Warga Negara. Salah satu fungsi etika politik dalam masyarakat adalah untuk memastikan bahwa orang memiliki cara untuk menyelesaikan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, berdasarkan etika politik berbasis misi daripada perasaan dan tekad. , adalah untuk menyediakan ruang informasi kepada publik. Ini membantu kita untuk mendiskusikan masalah ideologis secara efisien. Secara obyektif, etika politik dapat memberikan tolok ukur dan panduan normatif bagi mereka yang ingin menilai tatanan politik dan kualitas hidup dengan mengukur kerugian manusia atau pelanggaran legitimasi moral dalam keputusan politik. .

### E. Pancasila Dan Uud 1945 Satu Kesatuan



UUD 1945 tidak terlepas dari sistem nilai Pancasila yang dikandungnya. Selain UUD 1945 dalam arti konstitusi tertulis, ada juga konstitusi dalam arti tidak tertulis dalam naskah pokok UUD 1945, yaitu nilai-nilai yang ditanamkan dalam realitas kehidupan masyarakat . . bangsa. Hal ini juga termasuk dalam pengertian UUD dalam arti luas. Dengan demikian Pancasila tidak dapat lagi mengembangkan pemahaman yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, namun keduanya tetap berkaitan erat. Untuk itu perlu dipahami bahwa UUD 1945 memiliki ruh, “roh” atau Pancasila. Rakyat tidak dapat dan tidak boleh memahami ketentuan UUD 1945 terlepas dari semangat atau jiwanya, panca nilai Pancasila. Elaborasi politik nasional. ) sebagaimana termuat dalam pasal-pasal UUD 1945.

## **KESIMPULAN**

Jika mencermati kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dewasa ini, pemahaman nilai-nilai Pancasila mulai luntur dan tidak terlihat mendalam. Tindakan dan Tindakan Masih banyak tugas dan kewajiban yang terjadi, pelanggaran dan beberapa penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya ideologi nasional, tetapi falsafah hidup kebangsaan yang disarikan dari nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi. Berkat bangsa Pancasila, Indonesia memiliki harga diri dan martabat bangsa, sehingga kelima sila yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Pancasila sebagai ideologi nasional tetap menarik untuk dikaji dari berbagai sudut pandang, dan secara politik lahirnya Pancasila bukanlah jalan yang mudah. Keyakinan nasional Indonesia, budaya, adat istiadat, suku atau ras, dll. Pancasila mencerminkan etos ideologisnya dalam kehidupan berbangsa. Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa dalam susunan Lima Sila terdapat perintah yang dapat dikatakan sebagai perintah pertama dan terpenting. empat perintah lainnya.

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Hamid, Anas Shalahuddin, Beni A. Saebani,, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Pustaka Setia Bandung, 2012.
- Agus, Andi Aco. Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM.



- 
- Arif, Dikdik Baehaqi. *Membingkai Keberagaman Indonesia: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Program Kurikuler.*
- Astawa, Putu Ari. *Integrasi dalam Nasional Materi Kuliah Kewarganegaraan, Universitas Udayana.2017.*
- Cetakan Pertama, 1989.
- Falaq, Yusuf. *Pendidikan Kewarganegaraan Merajut Modernisasi Kebhinekaan Indonesia.* JF Press: Kudus.
- Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama 2010,
- Hurri, Ibnu & Munajat, Asep. *Pendidikan S Kewarganegaraan Panduan Untuk Mahasiswa, Pendidik dan Masyarakat Secara Umum.* CV. Nurani.2016.
- Jakarta, Cetakan Pertama, 2015
- Jakarta. kemendiknud. 2016.
- Jatmiko, Wisno dkk . *Panduan Penulisan Artikel Ilmiah.* Depok. Universitas Indonesia.2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan,* Sinar Grafika, ,
- Lestari, Gina. *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara.* Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.* Th. 28. Nomor 1. (Februari. 2015).
- Moh. Mahfud MD., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* Rineka Cipta, 2001
- Saputra, Lukman Surya dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.*
- Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila,* Penerbit Andi offset, Yogyakarta,2006.
- Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum DI Negara Pancasila,* Penerbit Pustaka Kartini,
- Suparlan, Parsudi. *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?.* Universitas Indonesia dalam jurnal *Antropologi Indonesia* 73.2003.
- Syahrial Syarbaini, *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan,*
- Tim Ganesha operation. *Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS VII.* Surabaya: Penerbit Duta. 2017